

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan antara para pemegang saham sebagai *principal* dan manajer sebagai agen. Teori agensi didefinisikan sebagai suatu kontrak antara dua pihak yaitu *principal* yang mendelegasikan otoritas pengelolaan perusahaan kepada agen yang mengelola perusahaan secara langsung (Jensen & Meckling, 1976). Dalam kerja samanya, kedua pihak tersebut memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan. Pemegang saham sebagai *principal* menginginkan agen sebagai pengelola perusahaan untuk menjalankan tanggung jawab dengan baik, sehingga dapat mencapai nilai perusahaan yang maksimal. Begitu pula manajemen yang dalam hal ini berperan sebagai agen menginginkan imbalan atas pengelolaan terhadap perusahaan.

Arifin (2005) menjelaskan salah satu asumsi yang melandasi teori agensi, yaitu asumsi keorganisasian. Asumsi keorganisasian membahas adanya konflik antar pihak dalam perusahaan, efisiensi kinerja, dan *asymmetric information* yang terjadi antara *principal* dan agen. Manajer sebagai agen yang bertanggung jawab langsung atas operasional perusahaan dan pelaporan keuangan tentunya memiliki informasi

yang lebih lengkap dan menyeluruh mengenai perusahaan. Sedangkan para pemegang saham sebagai *principal* yang tidak secara langsung terlibat dalam operasional perusahaan memiliki keterbatasan informasi.

Kurniawansyah et al. (2018) menyebutkan setidaknya terdapat dua masalah yang timbul akibat *asymmetric information* yang terjadi antara kedua belah pihak. Masalah tersebut adalah *moral hazard* (tindakan manajer yang menyeleweng dari kesepakatan) dan *adverse selection* (*principal* tidak dapat memastikan kemampuan yang sebenarnya dari agen). Pada dasarnya, *principal* dan agen adalah dua pihak yang memiliki posisi dan kepentingan yang bertolak belakang namun keduanya menjalin kerja sama karena saling membutuhkan. Baik agen maupun *principal* keduanya memiliki kepentingan masing-masing karena pada dasarnya keduanya merupakan *homo economicus* (Arifin, 2005).

Manajemen sebagai pihak yang diberikan tanggung jawab oleh *principal* seharusnya lebih mementingkan kepentingan pemegang saham. Namun tidak sedikit terjadi kasus dimana manajemen lebih mementingkan dan memaksimalkan keuntungan pribadi. Manajemen dapat memanipulasi laporan keuangan dengan memanfaatkan *asymmetric information* guna mencapai tujuan yang diinginkan. Melalui manipulasi laba atau beban, manajemen dapat membuat laporan keuangan seolah-olah selalu baik. Manipulasi laba dan beban ini berkaitan dengan bagaimana konservatisme akuntansi dalam perusahaan diterapkan.

Konservatisme akuntansi yang didasarkan pada teori agensi memberikan arahan kepada manajemen sebagai agen untuk lebih berhati-hati dalam mengakui laba dan beban dalam laporan keuangan. Dengan mengetahui faktor yang

berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi, *principal* mampu mengawasi kinerja manajemen dengan melihat bagaimana kebijakan akuntansi dilaksanakan dalam perusahaan. Apakah manajemen cenderung bersifat optimistik atau pesimistik dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.

2.2 Konservatisme Akuntansi

2.2.1 Pengertian Konservatisme Akuntansi

Menurut Ratnadi (2016) konservatisme akuntansi merupakan suatu respon berupa sikap kehati-hatian perusahaan terhadap ketidakpastian dengan cara mempercepat pengakuan kerugian yang akan terjadi di masa yang akan datang, namun tidak segera mengakui keuntungan atau laba yang kemungkinan akan terjadi hingga laba tersebut benar-benar terealisasi. Savitri (2016) dalam bukunya menyebutkan bahwa konservatisme akuntansi diinterpretasikan sebagai suatu bentuk kehati-hatian (*prudent*) yang diterapkan perusahaan dalam menyusun laporan keuangan, sehingga terdapat kecenderungan pesimisme dalam laporan keuangan. Secara tidak langsung konservatisme akuntansi menyebabkan pengungkapan dalam laporan keuangan lebih rendah dari *true value*.

Penerapan konservatisme akuntansi bertujuan untuk mengurangi optimisme perusahaan yang terlalu berlebihan (Andreas et al., 2017). Dari perspektif teori keagenan, setidaknya terdapat dua pihak yang memiliki kepentingan berbeda dalam suatu perusahaan yaitu manajer sebagai agen dan investor sebagai *principal* (Luayyi, 2010). Adanya pemisahan kepentingan kedua pihak tersebut menyebabkan munculnya risiko kecenderungan manajemen sebagai agen untuk memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

ataupun bonus melalui cara melebih-lebihkan laba perusahaan (Christina, 2021). Menurut Lafond dan Watts (2007) dalam Christina & Si (2021), konservatisme akuntansi menjadi cara untuk mengurangi risiko terjadinya *earning management* dalam perusahaan.

2.2.2 Pengukuran Konservatisme Akuntansi

Menurut Watts (2003) terdapat tiga metode pengukuran konservatisme akuntansi dalam suatu perusahaan yaitu:

1) *Net Asset Measures*

Pengukuran konservatisme dengan model *net asset measures* pada dasarnya mengukur *undervalue* dari *net asset* dan *overvalue* dari kewajiban (Savitri, 2016). Perusahaan yang menerapkan konservatisme akan memiliki *net asset* yang nilainya di bawah nilai pasar, serta kewajiban yang nilainya berada di atas nilai pasar (Halimah et al., 2021). Ratnadi (2016) dalam bukunya menyebutkan bahwa berdasarkan penelitian Beaver dan Ryan pada tahun 2000, ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat konservatisme melalui *net asset measures* adalah dengan menggunakan rasio *market to book value equity*. Nilai ekuitas pada tanggal neraca menjadi nilai *book value*, sedangkan *market value* diukur berdasarkan harga penutupan saham saat pengumuman dengan tujuan nilai sesuai dengan pasar (Fala, 2007, dalam Halimah et al., 2021). Apabila hasil perhitungan bernilai lebih dari 1 berarti perusahaan menerapkan akuntansi yang konservatif karena nilai buku *net asset* perusahaan lebih rendah dari nilai pasarnya. Savitri (2016) menjelaskan formula yang digunakan dalam mengukur konservatisme melalui *market to book value equity*:

$$\frac{\text{Market value of common equity}}{\text{Book value of common equity}} = \alpha_t + \alpha_i + \sum_{j=0}^6 \beta_j R_{j-i} + \varepsilon_{t,i}$$

Keterangan:

α_t : Variasi nilai *market to book value* perusahaan dari tahun ke tahun

α_i : Komponen bias *market to book value* perusahaan

R_{j-i} : Return on Equity (ROE) selama 6 tahun sebelum tahun t

2) *Earnings and accrual measures*

Andreas, et al. (2017) dalam menghitung konservatisme menggunakan *earnings and accrual measures* yang diadaptasi dari penelitian Givoly dan Hyan (2000). *Earnings and accrual measures* mengukur konservatisme dengan cara mencari *non-operating accrual* (Ratnadi, 2016). *Non-operating accrual* diperoleh dari pengurangan laba bersih dengan aliran kas dari aktivitas operasi. Akrua non operasional tersebut kemudian dibandingkan dengan keseluruhan total aset yang dimiliki perusahaan, sehingga mencerminkan tingkat akrual dari keseluruhan aset. Hasil akrual yang semakin besar menunjukkan semakin konservatif akuntansi yang diterapkan di perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori bahwa konservatisme akuntansi tidak segera mengakui pendapatan tetapi mempercepat pengeluaran biaya.

Dalam perhitungan *earnings and accrual measures*, depresiasi dan amortisasi dikeluarkan dari laba bersih karena bukan merupakan pengeluaran dari kegiatan operasional melainkan bagian dari kegiatan investasi (Savitri, 2016). Adapun formula *earnings and accrual measures* yang diadaptasi dari penelitian Givoly dan Hayn (2000) yaitu sebagai berikut:

$$KNSRV = \frac{(Net\ income - Depre.) - CFO}{Total\ asset}$$

3) *Earnings/stock returns relation measures*

Pengukuran konservatisme akuntansi menggunakan *earnings/stock returns relation measures* dilakukan oleh Basu pada tahun 1997, ia membuat model pengukuran konservatisme yang disebut dengan *Asymmetric Timeliness of Earnings (AT)* (Ratnadi, 2016). Dalam tulisannya, Savitri (2016) menyebutkan bahwa dalam perhitungan dengan metode AT ini akan tercermin konservatisme akuntansi yang mengharuskan rugi (*bad news*) diakui lebih cepat dibandingkan laba (*good news*). Perbedaan waktu pengakuan tersebut menyebabkan laba yang tercatat dalam laporan keuangan tidak terefleksikan sesuai laba sebenarnya (*asymmetric timeliness of earnings*).

Ratnadi (2016) menjabarkan formula perhitungan konservatisme metode *asymmetric timeliness of earnings* ini berdasarkan penelitian yang dilakukan Basu pada tahun 1997 yang menggunakan model regresi *cross-sectional* dalam penilaiannya. Formula metode AT sebagai berikut:

$$\frac{EPS_{it}}{P_{it}} = \alpha_0 + \alpha_1 DR_{it} + \beta_0 R_{it} + \beta_1 R_{it} \times DR_{it} + \varepsilon$$

Keterangan:

EPS_{it} : Laba per lembar saham untuk perusahaan I tahun t

P_{it} : Harga pasar pembukaan (*opening stock market price*)

R_{it} : Return saham untuk perusahaan i tahun t

DR_{it} : variabel dummy, 1 apabila return saham perusahaan i tahun t negatif, dan 0 apabila return saham untuk perusahaan i dalam tahun t tidak negatif.

β_1 : Koefisien *asymmetric timelines* yang merupakan indicator konservatisme akuntansi. Semakin besar β_1 menunjukkan semakin tingginya tingkat konservatisme akuntansi yang diterapkan.

Metode pengukuran konservatisme akuntansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *earnings and accrual measures*. Pemilihan metode ini karena penelitian konservatisme akuntansi pada perusahaan subsektor konstruksi ini lebih berfokus pada pendapatan perusahaan yang bersifat akrual dan tidak bisa diakui secara sekaligus saat itu.

2.3 Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Konservatisme Akuntansi

2.3.1 *Debt covenant*

Berjalannya operasional suatu perusahaan tentunya karena tersedianya sumber dana yang berasal dari modal sendiri (internal) maupun dari luar berupa utang. Dalam teori akuntansi positif, *debt covenant* menjadi salah satu hipotesis yang berkaitan dengan kontrak utang. *Debt covenant* dapat diukur menggunakan rasio *leverage* (Alfian & Sabeni, 2013). Rasio *leverage* menunjukkan porsi total aset yang dibiayai dengan utang. Secara tidak langsung, rasio *leverage* ini dapat digunakan oleh para kreditor untuk mengetahui tingkat kemampuan pengembalian utang oleh perusahaan.

Adanya kepentingan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan utang dari luar membuat manajemen berusaha terlihat baik dalam performa setiap tahunnya. Latar belakang inilah yang menjadi salah satu motif manajemen untuk cenderung membuat laporan keuangan terlihat sebaik mungkin. Manajemen akan berusaha untuk selalu menaikkan laba dan menurunkan liabilitas maupun beban perusahaan. Hal tersebut tentunya menjurus pada prinsip kehati-hatian atau konservatisme akuntansi perusahaan yang cenderung kurang. Susanto & Ramadhani (2016) melakukan perhitungan *leverage* dengan formula sebagai berikut:

$$Leverage = \frac{Total\ Utang}{Total\ Aset}$$

2.3.2 Intensitas Modal

Intensitas modal berkaitan dengan biaya politik dari suatu perusahaan, semakin besar modal yang digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan maka *political cost* yang dikeluarkan makin besar (Alfian & Sabeni, 2013). Perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi dapat dikatakan sebagai perusahaan yang berukuran besar. Perusahaan yang besar akan lebih disoroti oleh pemerintah, sehingga potensi biaya politik yang dimiliki cukup besar. Hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki intensitas modal yang tinggi akan lebih konservatif dalam akuntansinya.

Intensitas modal diinterpretasikan sebagai besarnya aset yang dimiliki perusahaan dan dibutuhkan untuk kegiatan operasi dalam tujuan memperoleh laba dan pendapatan. Susanto & Ramadhani (2016) mengukur intensitas modal dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Intensitas modal} = \frac{Total\ aset\ sebelum\ depresiasi}{Penjualan}$$

2.3.3 Risiko Litigasi

Risiko litigasi merupakan risiko perusahaan yang berasal dari kekecewaan pihak eksternal akibat dirugikan oleh informasi dalam laporan keuangan (Savitri, 2016). Pihak eksternal tersebut dapat berasal dari kreditor, investor, dan regulator. Risiko litigasi dapat diukur menggunakan berbagai indikator. Risiko litigasi perusahaan dapat muncul karena adanya kesalahan dalam laporan keuangan yang terjadi pada perusahaan-perusahaan *go public*. Menurut Ahmad Juanda (2009) dalam Savitri (2016), intensitas risiko litigasi semakin tinggi ketika penegakan hukum (*law enforcement*) dalam suatu lingkungan pasar modal dijalankan dengan baik.

Menurut Savitri (2016), risiko litigasi didasari karena adanya distorsi akuntansi, antara lain:

- 1) Kesalahan dan ketidaklengkapan estimasi yang dilakukan manajemen
- 2) Adanya fleksibilitas dalam akuntansi yang bisa menjadi celah *fraud*
- 3) Standar akuntansi yang gagal dalam menangkap realita ekonomi.

Dalam penelitian Sinambela & Almilia (2018), risiko litigasi dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Risiko Litigasi} = UP + \frac{\text{Utang tidak lancar}}{\text{Total Aset}} + \frac{\text{Utang lancar}}{\text{Aset lancar}}$$

2.3.4 Pajak

Pajak yang dikenakan terhadap perusahaan konstruksi adalah PPh Badan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah memberikan pengaruh terhadap perhitungan laba pada laporan keuangan perusahaan. Beberapa kali tarif pajak badan mengalami perubahan. Tarif PPh badan sejak tahun 2019 adalah sebesar 25%, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 28%. Tarif PPh Badan Kembali mengalami penurunan pada tahun 2020, yaitu menjadi 22%. Perubahan tarif pajak ini memberikan pengaruh terhadap penerapan konservatisme akuntansi.

Menurut Rusydi et al. (2017), perusahaan akan cenderung menurunkan tingkat konservatisme akuntansi ketika tarif pajak turun. Sinambela & Almilia (2018) menghitung pajak melalui *sales growth perusahaan*

$$Sales\ growth = \frac{Net\ sales(t) - Net\ sales(t - 1)}{Net\ sales(t - 1)}$$

2.4 Perusahaan Subsektor Konstruksi

Konstruksi merupakan kegiatan yang menghasilkan keluaran berupa bangunan atau konstruksi lain yang menyatu dengan lahan tempat konstruksi tersebut didirikan (Badan Pusat Statistik, 2021). Perusahaan subsektor konstruksi merupakan perusahaan yang bergerak memberikan pelayanan berupa jasa

pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, pekerjaan konstruksi merupakan pekerjaan yang dilakukan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan suatu bangunan.

Dijelaskan dalam UU No 18 tahun 1999 bahwa terdapat tiga jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan subsektor konstruksi, antara lain: Usaha perencanaan konstruksi, Usaha pelaksanaan konstruksi, dan Usaha pengawasan konstruksi. Kegiatan konstruksi menghasilkan *output* berupa jalan, jembatan, rel kereta api, jaringan listrik dan komunikasi, bandara, bangunan air dan drainase, terowongan, bangunan sanitasi, dan lain-lain.